



## Antara Sungai dan Kota: Dinamika Permukiman Pesisir dan Delta di Lakkang Kota Makassar (1970-2013)

Fitra Widya Wati

Universitas Negeri Makassar, Indonesia. E-mail: [fitra.widya.wati@unm.ac.id](mailto:fitra.widya.wati@unm.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Social change,  
Urbanization, Local  
culture, Lakkang.

**Kata kunci:**

Perubahan sosial,  
Urbanisasi, Budaya lokal,  
Lakkang.

**How to cite:**

Wati, F. W. (2025).  
Antara sungai dan kota:  
Dinamika permukiman  
pesisir dan delta di  
Lakkang Makassar (1970-  
2013). *Jambura History  
and Culture Journal*, 8(1),  
17-35.

**DOI:**

10.37905/jhcj.v8i1.35772

Submitted : 26 Oktober 2025

Accepted : 30 November 2025

Published : 08 Desember 2025

### ABSTRACT

This study aims to explain the social, economic, and cultural changes of the Lakkang community as a region living between the river environment and urban expansion. This study uses historical research methods through four stages: heuristics (collection of archival sources and interviews), source criticism (verification of the authenticity and credibility of data), interpretation (interpretation of cause-and-effect relationships), and historiography (writing analytical narratives). The results show that government decentralization and infrastructure development, such as electricity, docks, and clean water, have strengthened community connectivity with Makassar City. On the other hand, urbanization and river pollution pose new challenges to the sustainability of the traditional fishpond economy. The Lakkang community remains able to adapt by maintaining the values of *siri' na pacce*, kinship systems, and social solidarity as a local cultural identity that persists amidst the currents of modernity.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Lakkang sebagai suatu wilayah yang hidup di antara lingkungan sungai dan ekspansi perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, melalui empat tahap: heuristik (pengumpulan sumber arsip dan wawancara), kritik sumber (verifikasi keaslian dan kredibilitas data), interpretasi (penafsiran hubungan sebab-akibat), dan historiografi (penulisan naratif analitis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pemerintahan dan pembangunan infrastruktur seperti listrik, dermaga, serta air bersih telah memperkuat konektivitas masyarakat dengan Kota Makassar. Di sisi lain, urbanisasi dan pencemaran sungai menimbulkan tantangan baru bagi keberlanjutan ekonomi tambak tradisional. Masyarakat Lakkang tetap mampu beradaptasi dengan mempertahankan nilai *siri' na pacce*, sistem kekerabatan, dan solidaritas sosial sebagai identitas budaya lokal yang bertahan di tengah arus modernitas

Copyright © 2026 JHCJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Dinamika perkembangan perkotaan di Indonesia dalam lima dekade terakhir menunjukkan pola transformasi sosial-spasial yang berlangsung cepat, terutama pada wilayah pesisir dan delta yang menjadi ruang pertemuan antara aktivitas ekologis, ekonomi, dan sosial. Kota Makassar merupakan salah satu

contoh utama dari fenomena ini. Sebagai metropolis terbesar di kawasan Indonesia Timur, Makassar mengalami ekspansi ruang kota sejak 1970-an seiring pertumbuhan penduduk, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan mobilitas masyarakat (Zainul, 2015). Perkembangan ini tidak hanya mengubah kawasan pusat kota, melainkan juga memberi tekanan pada ruang-ruang pinggiran seperti delta, pesisir, dan pulau kecil di sekitar kota. Salah satu kawasan yang terdampak adalah Kelurahan Lakkang, sebuah permukiman pesisir yang berada dalam delta Sungai Tallo dan Sungai Pampang dan dikenal memiliki karakter tradisional yang masih kuat.

Secara ekologis, Lakkang merupakan kawasan dataran delta yang terbentuk melalui proses sedimentasi jangka panjang, sehingga memiliki pola ruang khas permukiman tepi sungai. Secara spasial, Lakkang terpisah dari hiruk pikuk pusat kota, namun tetap berada dalam radius pertumbuhan urban Makassar. Kondisi ini menjadikan Lakkang sebagai ruang unik yang memperlihatkan pertemuan antara tradisi dan modernitas. Masyarakatnya masih mempertahankan rumah panggung kayu dengan pola ruang tradisional Makassar, yaitu pembagian kepala, badan, kaki rumah yang berfungsi sebagai struktur sosial, religius, dan ekologis (Marwati & Oktawati, 2023). Selain itu, praktik komunal seperti gotong royong, pemanfaatan ruang publik untuk musyawarah, dan berlangsungnya seni tradisional memperlihatkan bahwa Lakkang berbeda dari kawasan kota yang cenderung individualistis dan materialistis.

Namun demikian, keberlanjutan karakter tradisional Lakkang mulai diuji akibat meningkatnya perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis di sekitarnya. Pertumbuhan Kota Makassar yang ekspansif sejak 1990-an menyebabkan perubahan penggunaan lahan di kawasan delta, masuknya infrastruktur baru, dan perubahan orientasi ekonomi masyarakat. Penelitian mengenai tutupan lahan menunjukkan adanya pergeseran signifikan pada fungsi-fungsi ekologis delta yang memengaruhi pola permukiman dan kualitas lingkungan, sehingga pengembangan kawasan perlu menggunakan perspektif ekologis untuk

menghindari degradasi ruang hidup (Akbar, 2024). Dalam beberapa kasus, perubahan ini dipicu pula oleh pembangunan infrastruktur regional, proyek perairan, dan tekanan urbanisasi yang semakin masuk ke wilayah pesisir.

Selain tekanan ekologis, perubahan sosial juga ikut membentuk struktur permukiman Lakkang. Syarif (2020) menunjukkan bahwa masyarakat Lakkang mulai mengembangkan pola permukiman kolektif yang lebih terorganisasi sebagai respons adaptif terhadap risiko lingkungan seperti banjir, pasang sungai, dan perubahan aliran air. Adaptasi sosial ini merupakan wujud dari resiliensi komunitas pesisir, yang mampu mempertahankan identitas budaya sembari menyesuaikan diri terhadap gangguan eksternal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi ruang permukiman tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau tekanan urbanisasi, tetapi juga oleh strategi adaptasi masyarakat yang memiliki pemahaman ekologis lokal.

Lebih jauh, sejak ditetapkan sebagai destinasi wisata budaya dan ekowisata pada 2011, Lakkang juga mulai mengalami perubahan orientasi ekonomi. Kegiatan pariwisata memperkenalkan peluang baru bagi ekonomi lokal, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan terkait pelestarian budaya dan kapasitas lingkungan delta. Pengembangan wisata berbasis budaya, sebagaimana ditunjukkan oleh Nurhikmah (2023), mengungkapkan adanya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Namun, pengelolaan yang tidak sensitif terhadap konteks lokal berisiko menimbulkan komersialisasi budaya dan degradasi lingkungan, terutama pada kawasan delta yang memiliki daya dukung terbatas.

Dinamika tersebut menegaskan pentingnya kajian historis dan sosial-spasial mengenai perkembangan permukiman Lakkang dalam rentang 1970–2013. Periode ini merupakan fase yang mencakup transformasi awal pembentukan Lakkang sebagai kelurahan, pembangunan ekonomi Makassar, modernisasi infrastruktur, dan masuknya agenda pengembangan pesisir. Kajian mengenai sejarah perubahan permukiman dan kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat Lakkang akan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana interaksi antara sungai, kota, dan masyarakat menciptakan pola ruang yang unik. Selain itu, studi ini penting sebagai basis bagi perumusan kebijakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang mengintegrasikan kearifan lokal, mitigasi risiko bencana, pelestarian budaya, serta keberlanjutan ekologis delta. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan dalam konteks sejarah lokal Makassar, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam diskursus akademik mengenai transformasi permukiman pesisir di kota-kota Asia Tenggara. Kompleksitas interaksi antara modernitas dan tradisi, antara tekanan urbanisasi dan resiliensi komunitas, serta antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis menjadikan Lakkang sebagai laboratorium sosial yang kaya untuk dipelajari lebih mendalam.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksi dinamika permukiman pesisir dan delta di Lakkang Makassar pada periode 1970-2013. Metode ini mencakup empat tahap utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1985). Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber primer seperti arsip kelurahan, peta perkembangan wilayah, foto-foto dokumenter, serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga Lakkang yang mengalami perubahan sosial sejak 1970-an. Selain itu, sumber sekunder berupa literatur akademik, laporan penelitian, dan data statistik dikumpulkan dari perpustakaan universitas, arsip pemerintah, dan repositori ilmiah. Setelah seluruh sumber terkumpul, tahap kritik sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan kredibilitas data melalui kritik eksternal yang menilai keaslian dokumen dan identitas narasumber dan kritik internal untuk menilai konsistensi isi informasi melalui triangulasi antar-sumber.

Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu proses menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi untuk memahami

transformasi sosial-spasial yang terjadi di Lakkang, termasuk perubahan pola permukiman, struktur sosial, dan adaptasi masyarakat terhadap tekanan urbanisasi dan lingkungan. Fakta-fakta tersebut dianalisis berdasarkan konteks historis dan ekologis agar menghasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif. Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penulisan narasi ilmiah mengenai perjalanan sejarah Lakkang dari 1970 hingga 2013 dengan merangkai temuan-temuan penelitian secara analitis dan sistematis. Narasi ini tidak hanya memaparkan perubahan internal masyarakat Lakkang, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika urban Kota Makassar secara lebih luas, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang evolusi permukiman pesisir dalam konteks sejarah perkotaan.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Kondisi Umum Wilayah Lakkang**

Kelurahan Lakkang terletak di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pada koordinat 05°06'38,2" LS dan 119°25'37,2" BT. Wilayah ini berbentuk delta yang diapit oleh Sungai Tallo di barat dan Sungai Pampang di timur, menciptakan kawasan semi-terisolasi dengan potensi ekologis tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Odum (1993), daerah delta merupakan ecotone penting yang memiliki keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis besar. Menurut Kantor Kelurahan Lakkang (2007), luas wilayahnya ±159 hektare dengan ketinggian di bawah 500 mdpl, terdiri atas tambak/empang 122,01 ha, persawahan 15,01 ha, serta permukiman dan perkebunan 25,62 ha. Dominasi tambak mencerminkan adaptasi ekologis masyarakat terhadap lingkungan sungai, sesuai teori cultural ecology Steward (1955) yang menjelaskan hubungan antara budaya dan lingkungan.

Akses ke Lakkang hanya melalui jalur sungai menggunakan perahu pincara atau bisseang, dengan jalur utama melalui dermaga Kera-Kera, Tol Ir. Sutami, dan Rappokalling. Waktu tempuh ke pusat Makassar sekitar 20 menit, menunjukkan posisi strategis meski tanpa akses darat langsung. Hal ini mendukung pandangan Polak (1954) bahwa geografi berperan menentukan

dinamika sosial manusia. Wilayah ini juga memiliki hutan mangrove yang berfungsi mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Djamaluddin (2017) menegaskan bahwa mangrove di Makassar berperan besar dalam penyerapan karbon dan ketahanan pesisir. Karena itu, pengelolaan lingkungan perlu berbasis komunitas (community-based environmental management) sebagaimana disarankan Adger (2000).

Dari sisi sosial-ekonomi, Lakkang memiliki 952 jiwa (300 KK) terdiri dari 482 laki-laki dan 470 perempuan dengan kepadatan 5 jiwa/ha, menunjukkan komunitas kecil dengan ikatan sosial kuat. Berdasarkan teori Durkheim (1893), masyarakat berpopulasi rendah cenderung memiliki solidaritas mekanik, yaitu kesamaan nilai dan gaya hidup yang kuat. Struktur usia didominasi kelompok 17-40 tahun (45,2%), yang menunjukkan potensi tenaga kerja produktif. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani tambak, nelayan, dan pengrajin daun nipah, dengan sistem bagi hasil yang menunjukkan ekonomi komunal tradisional. Berdasarkan teori Ellis (2000), masyarakat pesisir melakukan diversifikasi penghidupan untuk mengurangi risiko ekonomi. Namun, sejak awal 2000-an, produktivitas tambak menurun akibat pencemaran industri, sehingga banyak warga beralih menjadi buruh pabrik di Tamalanrea dan Panakkukang, fenomena rural-urban linkage (Tacoli, 1998).

Secara budaya, masyarakat masih menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa utama, menunjukkan ketahanan identitas etnik (Koentjaraningrat, 2009). Bentuk rumah tradisional panggung tiga tingkat (rateang balla, tangnga balla, rawa balla) mencerminkan filosofi kosmos Bugis-Makassar menurut Hamid (1983) bagian bawah melambangkan dunia fana, tengah dunia kehidupan, dan atas dunia suci. Sebagian rumah kini dibangun permanen, namun bentuk panggung masih dominan. Berdasarkan data 2013, terdapat 13 ruas jalan dengan total panjang 3.413 meter, sebagian besar berupa paving blok dan tanah, di mana 49,6% masih rusak. Kondisi ini menggambarkan keterbatasan infrastruktur dasar dan dualisme pembangunan serta kemajuan sosial-ekonomi yang belum seimbang dengan akses fisik. Hal ini sejalan dengan Todaro &

Smith (2011) bahwa pembangunan wilayah terpencil membutuhkan keseimbangan antara infrastruktur dan penguatan modal sosial masyarakat.

### **3.2. Asal-usul Nama Lakkang dan Identitas Historis Wilayah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas historis Kelurahan Lakkang berakar pada perjalanan panjang penamaan wilayah serta pengalaman kolektif masyarakatnya selama berbagai periode sejarah. Pada masa lampau, wilayah ini dikenal dengan nama Bonto Mallangere, sebuah istilah dalam bahasa Makassar yang menggambarkan tempat tinggi yang memungkinkan penduduk mendengar suara-suara dari arah pusat kota. Berdasarkan kesaksian warga, suara letupan, ledakan, hingga bias cahaya dari peristiwa peperangan di Kota Makassar dapat terdengar dan terlihat hingga ke daerah ini. Pemaknaan tersebut memperlihatkan kuatnya hubungan antara masyarakat dengan ruang geografis yang mereka huni. Hal ini sesuai dengan konsep geografi historis yang dikemukakan oleh Carl Sauer (1941), bahwa pemahaman manusia tentang ruang selalu tercipta dari pengalaman ekologis yang berulang serta peristiwa historis yang direkam dalam ingatan kolektif.

Perubahan nama dari Bonto Mallangere menjadi Lakkang erat kaitannya dengan peristiwa pengungsian masyarakat akibat konflik DI/TII pada tahun 1950-1960. Setelah kondisi membaik dan penduduk kembali ke tanah asal, mereka menamai wilayah tersebut "Lakkang", yang menurut pemahaman lokal berarti "tidak terpisahkan" atau "tetap menyatu" (Abidin, wawancara pribadi, 3 Desember 2015). Penamaan ini mencerminkan tekad, kebersamaan, dan kekuatan sosial masyarakat untuk mempertahankan identitas kolektif mereka meski mengalami dislokasi akibat konflik. Hal ini selaras dengan teori place identity dari Proshansky (1978), yang menjelaskan bahwa identitas komunitas terbentuk melalui hubungan emosional, memori sejarah, dan keterikatan mendalam antara manusia dengan ruang tempat mereka hidup.

Penelitian Nugroho (2018) menunjukkan bahwa perubahan nama suatu tempat pascakonflik sering kali bertujuan mengembalikan identitas kelompok serta membangun narasi baru yang memperkuat kesatuan masyarakat. Temuan

tersebut selaras dengan kondisi Lakkang, di mana perubahan nama menjadi representasi memori kolektif yang ingin menegaskan kembali hubungan sosial setelah pengalaman traumatis. Selain itu, studi Suryawan (2020) menjelaskan bahwa toponimi berfungsi sebagai ruang simbolik yang menyimpan jejak trauma, migrasi, dan dinamika sosial suatu komunitas, sehingga mengganti nama tempat berarti melakukan rekonstruksi ruang sosial secara psikologis maupun politis.

Dalam konteks teori perubahan sosial, Soekanto (2009) menyebutkan bahwa dinamika nilai-nilai sosial, norma, pola perilaku, dan interaksi masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari proses evolusi sosial. Perubahan nama Lakkang bukan hanya mencerminkan sejarah konflik, tetapi juga keberlanjutan adaptasi sosial masyarakat yang tinggal di wilayah geografis unik: sebuah delta yang terisolasi oleh Sungai Tallo dan Sungai Pampang. Dengan demikian, penetapan nama Lakkang merepresentasikan kombinasi antara ingatan historis, kondisi geografis, dan identitas yang terus dibangun oleh masyarakatnya.

Selain itu, catatan sejarah lisan menunjukkan bahwa wilayah Lakkang memiliki peran strategis pada masa pendudukan Jepang, ketika pulau kecil ini digunakan sebagai markas militer dan gudang logistik. Setelah Jepang menyerah, wilayah ini kembali ditempati oleh kelompok Kahar Muzakkar sebelum akhirnya kembali aman pada 1960-an (Jamaluddin, wawancara pribadi, 3 Desember 2015). Peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan bahwa Lakkang bukan sekadar permukiman pesisir, tetapi ruang strategis yang terlibat dalam dinamika politik dan keamanan pada masa-masa krisis nasional.

Pandangan masyarakat tentang makna "Lakkang" sebagai ruang yang tak terpisahkan juga berpijak pada filosofi identitas tempat yang pernah disampaikan oleh Soekarno, bahwa nama bukan sekadar tanda geografis, tetapi simbol yang menghubungkan pengalaman sejarah, nilai perjuangan, dan martabat suatu komunitas. Dengan demikian, pemaknaan "Lakkang" menjadi

narasi penting yang menegaskan identitas sosial-ekologis masyarakat dan memperkuat legitimasi mereka atas ruang yang dihuni.

### **3.2. Proses Pembentukan Kelurahan Lakkang dan Transformasi Sosial Masyarakat (1970–2013)**

Terbentuknya Kelurahan Lakkang pada tahun 1970 merupakan hasil dari interaksi antara kondisi geografis, kebijakan pembangunan pemerintah kota, dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik. Sebelum perubahan status administratif tersebut, Lakkang masih menjadi bagian dari Kelurahan Tallo, dan akses menuju pusat pemerintahan sangat terbatas. Masyarakat bergantung sepenuhnya pada sampan kecil yang hanya mampu memuat dua hingga tiga orang, sehingga perjalanan menuju wilayah kota dapat menempuh waktu lebih dari satu jam (Yusuf, wawancara pribadi, 3 Desember 2015). Keterbatasan akses seperti ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, selaras dengan konsep geografi sosial bahwa akses fisik memengaruhi perkembangan sosial dan distribusi kesejahteraan dalam suatu komunitas (Sauer, 1941).

Kondisi tersebut mendorong Wali Kota Makassar saat itu, Daeng Patompo, memasukkan Lakkang sebagai prioritas dalam program Gerakan Masuk Kampung (GMK) pada akhir 1960-an. Program ini bertujuan membuka keterisolasian kampung dan menciptakan hubungan lebih kuat antara pusat kota dan permukiman pinggiran. Pada tahun 1970, pemerintah kemudian menetapkan Lakkang sebagai kelurahan baru, disertai pembangunan sekolah dasar, kantor kelurahan, dan puskesmas pembantu. Intervensi ini dapat dianalisis melalui teori perubahan sosial terarah menurut Soekanto (2006), yaitu perubahan yang muncul akibat kebijakan pembangunan serta inovasi dalam penyediaan fasilitas publik.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sebelum perubahan administratif tersebut, kondisi sosial masyarakat masih sangat sederhana. Rumah-rumah warga berupa rumah panggung berbahan kayu dan beratap nipah, sementara penerangan hanya mengandalkan pelita dan petromaks. Fasilitas kesehatan

belum tersedia, sehingga masyarakat bergantung pada pengobatan tradisional atau bantuan tetua kampung yang memiliki pengetahuan lokal (Hariani, wawancara pribadi, 3 Desember 2015). Lingkungan permukiman didominasi jalan tanah, dan akses menuju kota dilakukan melalui sungai. Arsitektur rumah panggung ini tidak hanya berupa ciri budaya, tetapi juga bentuk adaptasi ekologis terhadap kondisi lingkungan delta yang lembab, rawan banjir, dan memiliki permukaan tanah yang tidak stabil. Menurut Abu, struktur tiga tingkat rumah panggung Makassar *rawa balla*, *tangnga balla*, dan *rateang balla* mencerminkan perpaduan antara kepercayaan kosmologis dan kebutuhan ekologis dalam pola hunian masyarakat.

Memasuki tahun 1980-1990-an, perubahan sosial mulai terlihat dengan masuknya ganset, kemudian aliran listrik, serta penggunaan perahu bermotor yang mempermudah mobilitas. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk serta kedatangan pendatang baru memberikan dinamika baru pada struktur sosial masyarakat. Ekonomi masyarakat masih bertumpu pada tambak dan persawahan, tetapi keterhubungan dengan pusat kota membuka peluang ekonomi lain seperti buruh pabrik, pekerja informal, dan pedagang kecil. Melihat perubahan yang berlangsung selama 1970-2013, dapat disimpulkan bahwa Lakkang mengalami proses transformasi bertahap atau perubahan evolusioner sebagaimana dijelaskan dalam teori perubahan sosial. Perubahan ini terjadi melalui mekanisme: Akses fisik yang semakin terbuka (sungai sebagai jalur transportasi modern), Intervensi kebijakan pemerintah (GMK dan pembentukan kelurahan), dan Adaptasi ekonomi dan teknologi (alih profesi, listrik, motorisasi).

### **3.3. Dinamika Pembangunan Pemerintahan dan Infrastruktur Sosial di Lakkang**

Proses pembangunan Kelurahan Lakkang sejak awal penetapannya sebagai wilayah administratif tahun 1970 hingga 2013 menunjukkan transformasi sosial yang berlangsung perlahan tetapi konsisten. Pada fase awal, struktur pemerintahan masih sangat sederhana dan bersifat tradisional: hanya

terdiri atas kepala lingkungan yang berkoordinasi langsung dengan Kecamatan Tallo. Pelayanan publik belum terorganisasi dengan baik karena akses fisik menuju wilayah ini hanya bisa ditempuh melalui jalur air selama hampir satu jam perjalanan dari pusat kota. Kondisi geografis ini menjadikan Lakkang relatif terisolasi dari pusat pemerintahan Makassar, sehingga pembangunan fasilitas publik seperti kantor lurah, sekolah, dan puskesmas berlangsung bertahap seiring meningkatnya kebutuhan administratif masyarakat. Fenomena ini menggambarkan bentuk path dependence dalam pembangunan lokal (North, 1990), di mana keterbatasan awal secara geografis dan kelembagaan memengaruhi pola pertumbuhan wilayah di masa berikutnya.

Dalam konteks kebijakan, terbentuknya Lakkang sebagai kelurahan mencerminkan penerapan prinsip desentralisasi yang semakin menguat sejak Orde Baru. Desentralisasi pemerintahan di tingkat lokal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983) bahwa desentralisasi memungkinkan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat kapasitas institusi akar rumput (grassroots governance). Pemerintah Kota Makassar kemudian menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan karakteristik geografis Lakkang sebagai kawasan pesisir-delta. Misalnya, prioritas program difokuskan pada peningkatan akses air bersih, transportasi sungai, dan perbaikan rumah tangga nelayan semuanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan berbasis lokal.

Dari sisi kelembagaan, Lakkang mengalami pergantian lurah secara rutin setiap dua hingga tiga tahun. Walaupun rotasi ini relatif cepat, pemerintahan lokal tetap berjalan karena kuatnya ikatan sosial masyarakat yang menopang stabilitas administratif. Hal ini sesuai dengan gagasan Putnam (1993) tentang social capital, yaitu bahwa keberhasilan institusi lokal seringkali lebih ditentukan oleh kepercayaan, jaringan sosial, dan norma timbal balik dibandingkan oleh faktor struktural formal. Di Lakkang, bentuk kepercayaan

ini tampak dalam praktik gotong royong memperbaiki dermaga, membersihkan saluran air, dan membangun fasilitas sosial tanpa menunggu bantuan pemerintah. Dengan demikian, modal sosial menjadi fondasi penting yang menjaga kesinambungan birokrasi lokal sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan di mata warga.

Pembangunan infrastruktur di Lakkang berlangsung secara bertahap dan mencerminkan adaptasi antara kemampuan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Pada awal 1980-an, listrik mulai masuk menggantikan penggunaan pelita, menandai dimulainya modernisasi fasilitas dasar. Tahun 2002, pemerintah memperluas pelayanan air bersih melalui PDAM, diikuti pembangunan empat dermaga baru antara 2008-2013. Infrastruktur ini bukan hanya simbol kemajuan fisik, tetapi juga memperpendek jarak sosial-ekonomi antara Lakkang dan Makassar. Menurut konsep *infrastructure-led growth* (Calderón & Servén, 2010), penyediaan infrastruktur publik seperti jalan, dermaga, dan listrik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di Lakkang, dampak positifnya tampak pada peningkatan aktivitas ekonomi rumah tangga serta mobilitas tenaga kerja ke pusat kota.

Kebijakan pembangunan juga mulai diarahkan pada pelestarian lingkungan dan pengembangan berbasis potensi lokal. Penetapan Lakkang sebagai kawasan konservasi budaya dan penelitian terpadu pada 2006 menunjukkan paradigma baru dalam pembangunan yang menggabungkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti inisiatif PT XL Axiata pada 2011 yang menyediakan fasilitas komputer dan pelatihan digital, merupakan bentuk *public private partnership* yang efektif. Sejalan dengan pandangan Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011), kemitraan semacam ini memperluas kapasitas pemerintah dalam menjangkau komunitas marginal sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Puncak transformasi pembangunan terjadi ketika Lakkang terpilih dalam program *Coastal Community Development Project* (CCDP-IFAD) pada 2013. Melalui program ini dibentuk kelompok usaha bersama di sektor perikanan, seperti budidaya bandeng dan udang windu, serta pengolahan hasil laut menjadi abon ikan dan bakso bandeng. Proyek tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya secara lestari. Hal ini sejalan dengan konsep *community-based resource management* yang menekankan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ekosistem (Pretty, 2003). Dengan demikian, dinamika pembangunan Lakkang memperlihatkan integrasi antara tata kelola lokal, partisipasi masyarakat, dan kebijakan berorientasi keberlanjutan yang secara empiris berhasil mengurangi isolasi sosial-ekonomi kawasan tersebut..

### **3.4. Transformasi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Lakkang**

Transformasi sosial-ekonomi masyarakat Lakkang selama periode 1970-2013 berlangsung bersamaan dengan perubahan struktur ekonomi Kota Makassar yang semakin urban dan industrial. Pada masa awal, penduduk Lakkang menggantungkan hidup pada sistem ekonomi berbasis sumber daya alam: bertani, menambak, dan menangkap ikan di Sungai Tallo. Sistem produksi mereka bersifat subsisten, di mana hasil panen sebagian besar dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual ke pasar tradisional di Tallo. Model ekonomi seperti ini mencerminkan karakter *subsistence agriculture* yang dijelaskan oleh Ellis (2000), di mana produksi dilakukan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan sangat tergantung pada fluktuasi alam. Namun, sejak awal 1990-an, pembangunan Kawasan Industri Makassar (KIMA) menyebabkan penurunan kualitas air sungai akibat limbah industri, yang berdampak langsung pada hasil tambak dan perikanan.

Kondisi tersebut memperlihatkan hubungan erat antara degradasi lingkungan dan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Blaikie & Brookfield (1987) menyebut fenomena ini sebagai *environmental vulnerability*, di mana

tekanan ekologis akibat pembangunan dapat memperdalam kemiskinan struktural. Akibat penurunan produktivitas tambak, banyak warga Lakkang beralih menjadi buruh pabrik atau pekerja informal di kota. Sebagian lainnya menjual lahan kepada investor luar, sehingga terjadi pergeseran kepemilikan tanah yang mengubah struktur sosial-ekonomi komunitas. Meski demikian, masyarakat menunjukkan daya adaptasi yang kuat dengan memanfaatkan peluang ekonomi baru seperti perdagangan kecil dan jasa transportasi air. Perubahan ini menggambarkan strategi bertahan hidup yang fleksibel sebagaimana dijelaskan oleh Scoones (1998) melalui kerangka *sustainable livelihoods*, yaitu kemampuan masyarakat mengombinasikan berbagai sumber pendapatan untuk menjaga keberlanjutan hidupnya.

Selain transformasi ekonomi, sektor pendidikan menjadi faktor kunci dalam perubahan sosial di Lakkang. Sejak berdirinya sekolah dasar pada 1960-an dan sekolah satu atap (SD-SMP) tahun 2012, angka partisipasi pendidikan meningkat signifikan. Generasi muda mulai berorientasi pada pekerjaan formal di luar sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan teori *human capital* Becker (1993), peningkatan akses pendidikan memungkinkan mobilitas sosial vertikal dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pemuda yang melanjutkan pendidikan menengah di kota dan bekerja di sektor jasa. Peningkatan pendidikan juga berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesetaraan gender dalam keluarga.

Perubahan sosial juga terjadi dalam ranah budaya. Masyarakat Lakkang tetap mempertahankan sistem kekerabatan bilateral dan nilai-nilai adat siri' na pacce sebagai landasan etika sosial. Tradisi semparaga dan ritual songkobala masih dipertahankan meskipun frekuensinya berkurang. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep *selective acculturation* Berry (1997), yaitu proses adopsi nilai modern tanpa kehilangan identitas lokal. Dalam masyarakat Lakkang, unsur modernitas seperti pendidikan dan teknologi diterima, tetapi nilai-nilai adat dan keislaman tetap menjadi pedoman hidup. Nilai spiritualitas

ini menciptakan etika ekologis yang kuat: menjaga hutan mangrove dianggap bukan hanya tanggung jawab ekologis, melainkan kewajiban moral dan keagamaan. Kajian Taufik et al. (2020) menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Makassar memandang alam sebagai bagian dari sistem spiritual, sehingga konservasi mangrove sering dikaitkan dengan ajaran amanah terhadap ciptaan Tuhan.

Kekuatan sosial Lakkang juga bersumber dari solidaritas komunitas yang tinggi. Sistem pertolongan saat hajatan, kematian, dan gotong royong memperlihatkan *mechanical solidarity* sebagaimana dijelaskan Durkheim (2014, 1893), di mana kesamaan nilai dan kepercayaan menjaga integrasi sosial. Solidaritas ini menjadi modal sosial yang memungkinkan masyarakat bertahan di tengah tekanan modernisasi. Dengan demikian, proses transformasi sosial-ekonomi di Lakkang bukanlah perubahan yang destruktif, tetapi bentuk adaptasi dinamis yang menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Perubahan di Lakkang memperlihatkan bahwa masyarakat lokal dapat menjadi aktor utama pembangunan jika memiliki kapasitas sosial dan kelembagaan yang kuat. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga memperkaya dimensi budaya dan identitas lokal. Lakkang menjadi contoh nyata bahwa modernisasi tidak selalu meniadakan tradisi; sebaliknya, tradisi dapat berfungsi sebagai fondasi etis bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas.

#### **4. Kesimpulan**

Lakkang merupakan ruang sosial yang unik, di mana masyarakat hidup dalam ketegangan antara keterisolasian ekologis dan penetrasi urbanisasi kota. Sebagai wilayah delta yang dikelilingi Sungai Tallo dan Sungai Pampang, Lakkang awalnya berkembang sebagai komunitas agraris dengan sistem ekonomi berbasis tambak dan pertanian lahan basah. Namun, proses administratif yang menjadikannya kelurahan pada tahun 1970 membuka babak baru integrasi antara desa dan kota. Infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan dermaga mempercepat mobilitas sosial serta membuka akses

masyarakat terhadap sistem ekonomi perkotaan. Fenomena ini mengonfirmasi teori desentralisasi Rondinelli bahwa pemerintahan lokal berperan vital dalam memperkuat kapasitas pembangunan di wilayah periferal.

Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat Lakkang mengalami pergeseran dari sistem ekonomi subsisten menuju ekonomi campuran (*mixed economy*). Diversifikasi pekerjaan ke sektor jasa dan industri menunjukkan peningkatan mobilitas kerja sekaligus kemampuan adaptasi terhadap perubahan struktural kota Makassar. Namun, dampak negatif industrialisasi seperti pencemaran air sungai turut menurunkan hasil tambak dan mempersempit lahan produktif. Meskipun demikian, masyarakat Lakkang menunjukkan ketahanan sosial (*social resilience*) yang kuat dengan mengembangkan strategi adaptasi berbasis nilai dan solidaritas komunal. Gotong royong, tolong-menolong, dan sistem kekerabatan bilateral menjadi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan komunitas di tengah tekanan lingkungan dan ekonomi.

Dari perspektif budaya, masyarakat Lakkang tetap mempertahankan nilai *siri'* na *pacce* sebagai fondasi etika sosial. Tradisi seperti *semparaga*, *songkobala*, serta kegiatan kolektif berbasis keagamaan menjadi penanda kesinambungan identitas di tengah perubahan zaman. Dalam konteks teori *social capital* dan *sustainable livelihoods*, nilai-nilai budaya ini tidak hanya berfungsi simbolik, tetapi juga instrumental dalam memperkuat mekanisme adaptasi sosial terhadap modernisasi dan urbanisasi. Dengan demikian, Lakkang memperlihatkan bentuk *selective acculturation*, menerima unsur kemajuan teknologi dan ekonomi tanpa kehilangan jati diri lokal. Dinamika di Lakkang memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan urbanisasi cepat, tetapi dapat tumbuh melalui pola *slow transformation* berbasis partisipasi dan solidaritas komunitas. Wilayah delta seperti Lakkang menjadi laboratorium sosial bagi integrasi antara ekologi, budaya, dan tata kelola lokal. Di antara sungai dan kota, masyarakat Lakkang tidak hanya menjadi saksi perubahan, tetapi juga pelaku aktif dalam membentuk ruang sosial yang adaptif, lestari, dan beridentitas.

## 5. Daftar Pustaka

- Abdullah, T., & Surjomiharjo. (1985). Ilmu sejarah dan historiografi: Arah dan perspektif. Gramedia.
- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347-364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>
- Akbar, M. F. (2024). Arahan pengembangan kawasan permukiman dengan pendekatan ekologis berdasarkan tutupan lahan di kawasan Delta Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Armansyah, A., Ali, M., & Rasyid, A. R. (2017). Pengembangan Delta Lakkang sebagai kawasan ekowisata di Kota Makassar. *Jurnal Wilayah & Kota Maritim*, 1(2), 45-56.
- Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5-34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). Land degradation and society. Methuen.
- Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2011). Public-private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. *Public Administration and Development*, 31(1), 2-14. <https://doi.org/10.1002/pad.584>
- Calderón, C., & Servén, L. (2010). Infrastructure and economic development in sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(suppl 1), i13-i87. <https://doi.org/10.1093/jae/ejp022>
- Djamaluddin, R. (2017). Peran ekosistem mangrove dalam ketahanan pesisir di Makassar. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 87-96. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.87-96>
- Durkheim, É. (1893). The division of labor in society. Free Press.

- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural involution: The processes of ecological change in Indonesia*. University of California Press.
- Gottschalk, L. (1985). *Understanding history: A primer of historical method*. Knopf.
- Hamid, A. (1983). *Arsitektur tradisional Bugis-Makassar*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Kantor Kelurahan Lakkang. (2007). *Profil wilayah Kelurahan Lakkang*. Pemerintah Kota Makassar.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Marwati, & Oktawati, A. E. (2023). Wujud arsitektur rumah tradisional di Delta Lakkang Kota Makassar. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 10(2), 15–28. <https://doi.org/10.24252/nature.v10i2.35876>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nugroho, A. (2018). Toponimi dan perubahan sosial: Studi perubahan nama tempat pascakonflik. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 23–34. <https://doi.org/10.7454/ai.v39i1.10491>
- Nurhikmah, S. (2023). *Konsep wisata budaya pada kawasan Delta Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar [Skripsi, Universitas Negeri Makassar]*.
- Odum, E. P. (1993). *Basic ecology*. Saunders College Publishing.
- Polak, F. L. (1954). *The image of the future*. Elsevier.
- Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *Science*, 302(5652), 1912–1914. <https://doi.org/10.1126/science.1090847>
- Proshansky, H. M. (1978). The city and self-identity. *Environment and Behavior*, 10(2), 147–169. <https://doi.org/10.1177/0013916578102002>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries: A review of recent experience. World Bank.
- Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. IDS Working Paper No. 72. Institute of Development Studies.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. RajaGrafindo Persada.
- Steward, J. H. (1955). Theory of culture change: The methodology of multilinear evolution. University of Illinois Press.
- Suryawan, I. G. (2020). Identitas toponimi dan memori kolektif komunitas lokal. *Jurnal Sejarah Nusantara*, 8(2), 145-160. <https://doi.org/10.21107/jsn.v8i2.9195>
- Syarif, E. (2020). Konfigurasi ruang permukiman Pulau Lakkang berbasis mitigasi bencana. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 9(4), 211-225. <https://doi.org/10.32315/jlbi.9.4.211>
- Tacoli, C. (1998). Rural-urban interactions: A guide to the literature. *Environment and Urbanization*, 10 (1), 147-166. <https://doi.org/10.1177/095624789801000115>
- Taufik, M., Rauf, R. A., & Darmawan, I. (2020). Religious values and environmental ethics in the coastal communities of Makassar. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1), 012014. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012014>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Economic development. Addison-Wesley.
- Zainul, J. (2015). Perubahan sosial masyarakat perkotaan di Indonesia. Pustaka Setia.